

Judul : Pengamanan Acara Pelantikan Anggota DPR/MPR TNI Terjunkan 6.000 Personel ke Gedung DPR/MPR
Tanggal : Senin, 30 September 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 4

Pengamanan Acara Pelantikan Anggota DPR/MPR TNI Terjunkan 6.000 Personel ke Gedung DPR/MPR

[JAKARTA] Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, TNI akan mengerahkan 6.000 personel TNI untuk mengamankan gedung DPR/MPR saat acara pelantikan anggota DPR/MPR pada Selasa (1/10). Jumlah personel itu bertambah dari sebelumnya 3.000 orang saat mengantisipasi demonstrasi mahasiswa pekan lalu. Jumlah yang sama juga akan dikerahkan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di tempat yang sama pada 20 Oktober mendatang.

"Insya Allah (acara pelantikan) dapat berjalan lancar ya. Kami siapkan 6.000 personel untuk mengamankan gedung MPR-DPR," kata Hadi usai Apel Pengamanan Pasukan Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Skadron 17 Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (30/9).

Panglima menyebutkan, pihaknya akan mempertebal pengamanan Ibu Kota. Hal itu untuk memastikan situasi negara dalam kondisi aman.

"Pertama kami mempertebal pengamanan di gedung DPR-MPR. Kedua, menjaga Istana, dan ketiga



Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) melakukan inspeksi pasukan saat Apel Kesiapan Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019 di Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (30/9).

kita jaga di sentra-sentra ekonomi seperti Glodok dan lainnya. Yang penting rakyat semuanya aman," katanya.

Panglima menjelaskan, perimeter pengamanan di kawasan Gedung DPR/MPR akan diperlebar. Titik-titik pengamanan masih sesuai rencana, tapi personel TNI tidak masuk ke dalam gedung DPR-MPR.

Ia mencontohkan, TNI akan memperkuat pengamanan di pintu-pintu utama masuk gedung DPR/

MPR. Pintu utama itu seperti Pejompongan karena di wilayah ini ada jalan yang masuk ke tol. Hal itu untuk memastikan agar tidak ada masyarakat masuk ke sana.

Selanjutnya, pengamanan di perempatan Slipi Perkuatan, itu adalah arah dari Petamburan dan arah menuju Palmerah karena di Palmerah itu ada stasiun kereta api dan ada pintu menuju Masjid ke gedung DPR MPR.

"Kita perbanyak pasukan TNI-Polri agar mas-

yarakat yang ingin melakukan unjuk rasa juga tidak membawa batu kita awasi di sana. Kita halau mereka kalau ingin masuk ke gedung DPR/MPR," kata Hadi.

Pengamanan di pintu belakang dekat lapangan tembak diperkuat menuju ke Hotel Mulia dan ke dalam gedung DPR/MPR. Untuk skenario selanjutnya, TNI akan menyiapkan helikopter apabila ada kendala masuk ke gedung DPR/MPR.

Petualang Politik

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan semua elemen masyarakat bahwa instabilitas politik dan keamanan akan merugikan semua pihak.

“Instabilitas politik dan keamanan hanya akan menguntungkan para petualang politik,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (29/9).

Bamsoet mendorong mahasiswa dan komunitas penggiat hukum menolak jika kegiatan menyampaikan atau menyuarakan pendapat ditunggangi para petualang politik yang membawa agenda politiknya sendiri. Dia berharap mahasiswa dan penggiat hukum untuk tetap fokus pada kegiatan menyuarakan aspirasi dalam me-

tidak berkeadilan,” tegasnya.

Karena itu, kata Bamsoet, tidak ada yang salah dengan gelombang protes atau unjuk rasa mahasiswa di sejumlah kota untuk mempersoalkan RUU KUHP dan RUU KPK. Meskipun dia mengakui ada sejumlah eksekusi dari rangkaian unjuk rasa itu.

“Namun, sejumlah eksekusi itu masih bisa ditoleransi, kecuali peristiwa meninggalnya dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya pun menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya dua mahasiswa itu dan mendesak Polri segera menuntaskan penyelidikan kasus itu,” tegas dia.

Lebih lanjut, Bamsoet menuturkan di tengah kegi-